PERAN KEPEMIMPINAN, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK, DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN¹

SUSYANTI

TRI UTAMI

Universitas Widya Dharma Klaten

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rendahnya nilai realisasi atau penerimaan PBB di daerah pedesaan menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Ketertaikan pemilihan sampel yakni Desa Candirejo dikarenakan banyaknya liputan atau pemberitaan media online yang menyatakan Desa Candirejo telah masuk zona merah kemiskinan.

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan oleh peneliti dinyatakan sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independennya adalah kepemimpinan kepala desa, kualitas pelayanan petugas pajak (perangkat desa), dan motivasi wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pada level 10% variabel kepemimpinan kepala desa (*leadership*) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*). Namun pada level 5% variabel kepemimpinan kepala desa (*leadership*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*). Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan petugas pemungut PBB (*quality*) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*) dan untuk variabel motivasi para wajib pajak bumi dan bangunan (*motivation*) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*).

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu kepemimpinan kepala desa (*leadership*), kualitas pelayanan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (*quality*), dan motivasi para wajib pajak bumi dan bangunan (*motivation*), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*).

Kata Kunci: pajak bumi dan bangunan (PBB), kepemimpinan kepala desa (*leadership*), kualitas (*quality*) pelayanan petugas pemungut pajak,

¹ Susyanti, Tri Utami. 2018. Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi. Jurnal Kiat Bisnis, 6 (4): 318-345.

pamong desa, perangkat desa, motivasi (*motivation*) wajib pajak, kepatuhan (*obedience*).

1. Pendahuluan

Atas dasar Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayarkan setiap tahunnya. Di dalam perkembangannya, sektor pajak ini yaitu PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan telah menjadi pajak daerah dan diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dimulai sejak tahun 2010.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan bagi wajib pajak dengan sistem pemungutan *official assessment system*, dimana pihak fiskus lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, Pemerintah daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB (Koentarto, 2011:2 dalam Thalib).

Menurut Purenda (2016) dalam liputan situs *online* Radar Solo (Jawa Pos), di Kabupaten Klaten realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari desa dinilai buruk. Penilaian tersebut sesuai dengan nilai total penerimaan pembayaran PBB per 1 Juni 2016 yang diperoleh dari *Data System* Bank Jateng untuk Kecamatan Ngawen yang hanya sebesar Rp192.549.612,- dari total baku sebesar Rp755.225.549,- Sehingga sisa tagihan PBB yang belum terbayar adalah sebesar 562.675.937,-

Berikut laporan bulanan PBB-P2 Kecamatan Ngawen per 1 Juni 2016.

Tabel 1.1. Laporan Bulanan PBB-P2 Kecamatan Ngawen per 1 Juni 2016.

Desa/Kelurahan		Baku	Jmlah SPT	Pembayaran PBB-P2			Sisa Tagihan		
				Sampai dengan 1 Juni 2016					
Kode	Nama			SPPT	(Rp)	(%)	(WP)	(Rp)	(%)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
001	Duwet	31.890.917	831	450	15.231.465	47,76	381	16.659.452	52,24
002	Gatak	45.343.985	1.112	748	27.523.669	60,70	364	12.820.316	39,30
003	Manjung	55.977.402	1,493	913	31.204.249	56,74	580	24.773.153	44,26
004	Senden	57.115.350	1.185	532	25.053.737	43,87	653	32.061.613	56,13
005	Ngawen	89.485.469	1.971	316	12.763.173	14,26	1.655	76.722.296	85,74
006	Kahuman	57.126.519	1.040	311	13.504.846	23,64	729	43.621.673	76,36
007	Kwaren	46.338.643	985	103	5.033.777	10,86	882	41.304.866	89,14
008	Pepe	41.609.524	1.216	97	4.316.863	10,37	1.119	37.292.661	89,63
009	Manjungan	36.212.391	854	430	16.023.529	44,25	424	20.188.862	55,75

010	Tempursari	53.884.857	1.175	96	5.492.825	10,19	1.079	48.392.032	89,81
011	Mayungan	101.856.776	1.804	259	11.047.213	10,85	1.545	90.809.563	89,15
012	Candirejo	66.596.453	1.947	401	16.495.295	24,77	1.546	50.101.158	75,23
013	Drono	71.787.263	1.611	228	8.858.971	12,34	1.383	62.928.292	87,66
TOTAL		755.225.549	17.224	4.884	192.549.612	25,50	12.340	562.675.937	74,50

*) Data di atas sesuai dengan *Data System* Bank Jateng

Rendahnya nilai realisasi PBB sepertinya berimbas pada pembangunan-pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Ngawen, bahkan khusus untuk Desa Candirejo telah masuk zona merah kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran dan uraian data-data di atas, penelitian ini bermaksud menganalisa tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan warga selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian juga diarahkan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa. Sejauh mana peranan mereka dalam kualitas pelayanan untuk mampu meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain pengaruh kepemimpinan dan kualitas pelayanan, peneliti juga tertarik untuk mengetahui pengaruh motivasi para wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian mengenai faktor-faktor yang disebutkan di atas menyebabkan wajib pajak yang berada di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai wujud atas kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Diharapkan pula dengan diketahuinya faktor penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di desa lainnya. Sehingga penelitian ini mengambil judul: “Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Penelitian ini terbagi ke dalam 5 bagian. Bagian 1 berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Bagian 2 dalam penelitian ini berisi tentang kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 mendiskripsikan tentang desain penelitian, yang terdiri dari pemilihan sampel, pengukuran variabel dan alat uji statistik yang digunakan. Bagian 4 menjelaskan tentang hasil penelitian dan bagian 5 menyajikan kesimpulan dan keterbatasan penelitian.

2. Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat (Niven, 2002), sedangkan menurut Bastable (2002), kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Patuh yaitu dengan sukarela mengikuti perintah, taat kepada perintah, dan kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan aturan dan mau berdisiplin.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, kepatuhan (bahasa Inggris: *compliance*) dalam tata kelola perusahaan, berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang

dalam suatu bidang tertentu. Lingkup suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, dalam penelitian ini standar atau aturan yang ditetapkan adalah oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait dengan pelayanan pajak daerah maupun lingkup nasional yaitu pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan jika subjek pajak tersebut dikenai wajib membayar pajak maka subjek pajak yang bersangkutan menjadi wajib pajak.

Menurut Muljono (2010) wajib pajak bumi dan bangunan adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut Undang-undang PBB. Dalam hal ini suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Sehingga Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011), dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Kartasapoetra dkk (1989) dalam Thalib (2013) berpendapat tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu khusus dalam pengguna hasil penerima PBB oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyarakat, seperti perbaikan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pendapat E. Ellyani (1989) yang dikutip Kiryanto (1998), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul jika ada salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi.

Serupa dengan pendapat Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam

situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan meliputi perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat waktu, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke kantor pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.

Variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menjadi variabel dependen (*dependent variable*) dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (*independent variable*). Sedangkan pengertian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi/menjadi penyebab berubahnya/timbulnya variabel dependen atau variabel terkait.

2.2 Kepemimpinan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut wikipedia bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Nurkolis, 2003). Faktor Kepemimpinan dalam menimbulkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai proses memengaruhi para wajib pajak dalam upaya mencapai tujuan yaitu terlunasnya besaran nominal pajak bumi dan bangunan yang terutang. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Thoha, 1995 dalam Fachrizal, 2013:169). Pada hakikatnya kepemimpinan memiliki pengertian yang lebih luas apabila dibanding dengan manajemen (Thoha, 2001). Dengan kata lain, kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan didalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang terikat dengan tata krama birokrasi atau ketentuan-ketentuan organisasi dan terikat dengan jalur komunikasi struktural.

Tannenbaum, Wescler, dan Massarik (dalam Winardi, 1997) menyimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan kepada desa dalam mencapai kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini adalah warga desa agar

patuh (bersedia) membayar besarnya nominal pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pengaruh kepada warganya akan menjadi variabel independen pertama dalam penelitian ini sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

2.3 Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian pelayanan menurut Kotler (2002) adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan kata kualitas meliputi suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas juga dapat mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan serta merupakan kondisi yang selalu berubah.

Dengan mengadopsi pengertian Kotler tersebut terkait definisi tentang kualitas dan pelayanan dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa guna memenuhi harapan warga desa selaku wajib pajak. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau *service* yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah-tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.

Dengan adanya pemahaman tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa yang diharapkan mampu mendorong peningkatan besarnya jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa akan menjadi variabel independen kedua dalam penelitian ini sehingga dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

2.4 Motivasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Mitchell (1997) menjabarkan pengertian motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat yang seringkali disamakan dengan semangat. Sehingga, perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Sebagian masyarakat mengartikan motivasi sebagai suatu alasan, dan sebagian lain mengartikan motivasi sama halnya dengan semangat.

Motivasi menurut Uno (2007) dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan penghormatan.

Teori mengenai motivasi juga dapat dikaitkan dengan teori penentuan tujuan, yaitu teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama (Locke, 1968). Artinya, tujuan memberitahu seorang apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan (Early, 1987).

Selain dua hipotesis di atas, penelitian ini juga berfokus pada pengaruh motivasi para wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga hipotesis ketiga dapat diambil sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh positif signifikan antara motivasi warga desa selaku wajib pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Candirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

3. Metode Penelitian

3.1 Data dan Sampel

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (Kuncoro, 2003, hal 213). Dan dinyatakan dalam skala interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik yang sudah diketahui. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur data dari pertanyaan kuesioner.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan mengisi serta menjawab item-item pertanyaan dalam kuesioner melalui sesi tanya jawab (*interview*) maupun mandiri dimana responden menjawab dengan mengisi (menyilang/melingkari) sendiri jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut tujuan penelitian (Kuncoro, 2003). Sampel dipilih berdasarkan tujuan peneliti, yaitu warga desa

Candirejo Kecamatan Ngawen yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan.

3.2 Pengukuran Variabel

3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden yang diukur dengan skala likert 5 poin. Sebuah penelitian empiris akan dapat dilakukan dengan baik jika data dikumpulkan dengan instrumen yang berkualitas. Kualitas instrumen tersebut ditunjukkan oleh validitas dan reliabilitasnya.

Pengukuran validitas dilakukan dengan teknik korelasi *product moment pearson* untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ukuran kevalidan dapat dilihat dari *correlation pearson* skor total yang memiliki korelasi signifikan 0.05 dan 0.01.

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji derajat kebebasan pengukuran dari kesalahan random dan karenanya menghasilkan bentuk yang konstan, atau dengan kata lain dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan konsisten atau tidak. Teknik pengujian adalah dengan menggunakan alat uji *cronbach's alpha*.

3.2.2 Asumsi Klasik

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas lebih besar daripada α maka asumsi normalitas terpenuhi. Selain pengujian normalitas, peneliti juga akan melakukan uji multikolinieritas untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi (*tolerance value*) dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umumnya dipakai adalah *tolerance* lebih kecil daripada 0.10 dan nilai VIF diatas 10. Jika uji multikolinieritas menghasilkan nilai *tolerance* lebih kecil daripada 0.10 dan nilai VIF di atas 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas dan sebaliknya.

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (periode sebelumnya). Cara mendeteksi ada dan tidaknya autokorelasi, dilakukan uji *Durbin-Watson* (DW test). Jika nilai DW terletak antara d_U dan $(4-d_U)$ berarti tidak ada autokorelasi.

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residualnya satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau *varians*

antar variabel independen tidak sama. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji *glejser*, yaitu meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen (Gujarati, 1995). Apabila variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen atau apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada *alpha* (0.05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapatnya heteroskedastisitas dalam model regresi banyak ditemukan pada data *crossection*. Dalam penelitian ini menggunakan data tersebut. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut dapat dilakukan dengan transformasi logaritma pada setiap variabel, baik independen maupun dependen (Ghozali, 2001). Namun dikarenakan penelitian ini bukan merupakan penelitian ekonometri (tidak melibatkan angka-angka rasio maupun angka nominal yang berdigit banyak, seperti dalam penelitian keuangan) maka hal tersebut tidak peneliti lakukan. Selain penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial yang melibatkan perilaku, juga dikarenakan jawaban yang diberikan atas respon dari kuesioner atas suatu perilaku merupakan jawaban yang bersifat subjektif.

3.3 Model Pengujian Statistik

Model pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Obedience = a + b_1Leadership + b_2Quality + b_3Motivation + e$$

Keterangan model:

<i>Obedience</i>	= Kepatuhan Wajib Pajak
<i>Leadership</i>	= Kepemimpinan
<i>Quality</i>	= Kualitas Pelayanan
<i>Motivation</i>	= Motivasi
<i>a</i>	= <i>intercept</i>
<i>b</i>	= <i>slope</i>
<i>e</i>	= <i>error</i>

4. Analisis Data dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan data kuesioner dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana yang menjadi responden adalah warga desa Candirejo Kecamatan Ngawen yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam kuesioner responden ditanyakan mengenai statistik demografi yang berkaitan dengan responden. Sehingga perlu sekiranya untuk dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari responden.

Dalam analisis ini, digunakan sebanyak 53 responden dari 55 responden yang mengembalikan kuesioner. Dua kuesioner yang lain tidak dapat digunakan sebagai sampel dikarenakan setelah melalui proses *editing* data, kuesioner tersebut tidak terisi dengan lengkap. Berikut gambaran proses pengumpulan data kuesioner:

Tabel 4.1. Gambaran proses pengumpulan data kuesioner

Kuesioner yang disebar	60	buah
Kuesioner yang kembali	55	buah
Kuesioner yang tidak valid	2	buah
Kuesioner yang valid	53	buah
Persentase pengembalian	91.67	persen
Persentase kuesioner valid	88.33	persen

Dengan demikian kuesioner yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki *response rate* yang sangat bagus.

Dalam analisis deskriptif untuk karakteristik responden dapat dilihat dari demografi responden, yaitu: umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan terakhir. Selain dari demografi responden, juga ditanyakan mengenai pernah/tidak mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta opini tentang tingkat masalah mengenai kepatuhan terhadap pajak bumi dan bangunan yang terjadi dewasa ini. Hasil data demografi responden, dapat dipaparkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2. Kategori usia responden

Kategori Usia	Jumlah	Persentase
Kurang dari 30 tahun	2	3,77%
31 – 40 tahun	14	26,42%
41 – 50 tahun	18	33,96%
51 – 60 tahun	13	24,53%
Lebih dari 60 tahun	6	11,32%

Tabel 4.3. Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	38	71,70%
Perempuan	15	28,30%

Tabel 4.4. Pendidikan terakhir

Kategori Usia	Jumlah	Persentase
Non gelar	50	94,34%
Sarjana (S1)	3	5,66%
Pasca Sarjana	0	0,00%

Tabel 4.5. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh	25	47,17%
Petani	4	7,55%
Karyawan Swasta	3	5,66%
PNS/Pegawai/Guru	1	1,89%
Wiraswasta	11	20,75%

Ibu Rumah Tangga	7	13,21%
Pengangguran	2	3,77%

Tabel 4.6. Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
Memiliki	23	43,40%
Belum/Tidak Memiliki	30	56,60%

Tabel 4.7. Sosialisasi/Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi/Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah	Persentase
Pernah mendapat	7	13,21%
Belum pernah mendapat	46	86,79%

Terkait jenis pekerjaan responden didominasi oleh para kaum buruh. Jenis pekerjaan berikutnya diduduki oleh wiraswasta, ibu rumah tangga, petani, karyawan swasta, pengangguran, dan guru. Mengenai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan, sebagian besar warga yang menjadi responden mengaku belum pernah memperoleh atau menghadiri kegiatan tersebut. Dari 53 responden hanya ada 7 responden yang mengaku pernah memperoleh kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan tersebut. Responden ditanya mengenai perhatian mereka terhadap masalah-masalah kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pertanyaan ini kemungkinan bias dikarenakan mereka menilai perhatian diri mereka sendiri. Responden dianjurkan memilih skala antara 1 sampai dengan 7, dengan skala dari yang terendah hingga tertinggi. Hasil skala tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden adalah 7 dengan kisaran 50,94%, dan diurutkan kedua responden menjawab 5 dengan kisaran 30,19%.

Tabel 4.8. Tanggapan Responden terhadap Masalah Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tanggapan Responden terhadap kepatuhan PBB	Jumlah	Persentase
Tidak penting 1	0	0,00%
2	0	0,00%
3	1	1,89%
4	4	7,55%
5	16	30,19%
6	5	9,43%
Sangat Penting 7	27	50,94%

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Pengukuran validitas dilakukan dengan teknik korelasi *product moment pearson* untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ukuran kevalidan dapat dilihat dari *correlation*

pearson skor total yang memiliki korelasi signifikan 0.05 dan 0.01.

Dari hasil validitas didapati bahwa untuk item pertanyaan-pertanyaan variabel kepemimpinan dapat dikatakan valid atau signifikan karena nilainya kurang dari 0,05 ($< 0,05$).

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan
(*Leadership*)

		leadTot
Lead1	Pearson Correlation	.305*
	Sig. (2-tailed)	.026
	N	53
Lead2	Pearson Correlation	.494**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead3	Pearson Correlation	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead4	Pearson Correlation	.516**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead5	Pearson Correlation	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead6	Pearson Correlation	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead7	Pearson Correlation	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead8	Pearson Correlation	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead9	Pearson Correlation	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Lead10	Pearson Correlation	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
leadTot	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

Sedangkan dari hasil validitas untuk variabel kualitas pelayanan petugas dan atau pemungut pajak bumi dan bangunan ditemukan bahwa untuk pertanyaan item 2 dapat dinyatakan tidak valid karena nilainya lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Sehingga untuk pengujian selanjutnya item pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan.

Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan
(*Quality*)

		QualTot
Qual1	Pearson Correlation	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual2	Pearson Correlation	.226
	Sig. (2-tailed)	.104
	N	53
Qual3	Pearson Correlation	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual4	Pearson Correlation	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual5	Pearson Correlation	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual6	Pearson Correlation	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual7	Pearson Correlation	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual8	Pearson Correlation	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual9	Pearson Correlation	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual10	Pearson Correlation	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
QualTot	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

Tabel 4.11. Hasil Uji Ulang terhadap Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (*Quality*), setelah mengeluarkan item pernyataan yang tidak valid (*Qual2*)

		QualTot_2
Qual1	Pearson Correlation	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual3	Pearson Correlation	.602**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual4	Pearson Correlation	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual5	Pearson Correlation	.885**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual6	Pearson Correlation	.956**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual7	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual8	Pearson Correlation	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual9	Pearson Correlation	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Qual10	Pearson Correlation	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
QualTot_2	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

Dalam uji validitas instrumen penelitian, hal serupa juga dialami oleh variabel motivasi, dimana ditemukan item pertanyaan yang tidak valid, yaitu item 4 (Motiv4) karena nilainya lebih dari 0,05 ($> 0,05$). Oleh karenanya untuk pengujian selanjutnya item pertanyaan tersebut tidak akan digunakan.

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi (*Motivation*)

		MotivTot
Motiv1	Pearson Correlation	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv2	Pearson Correlation	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv3	Pearson Correlation	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv4	Pearson Correlation	.235
	Sig. (2-tailed)	.090
	N	53
Motiv5	Pearson Correlation	.496**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv6	Pearson Correlation	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv7	Pearson Correlation	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv8	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv9	Pearson Correlation	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv10	Pearson Correlation	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
MotivTot	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

Tabel 4.13. Hasil Uji Ulang terhadap Validitas Variabel Motivasi (*Motivation*), setelah mengeluarkan item pernyataan yang tidak valid (*Motiv4*)

		MotivTot_2
Motiv1	Pearson Correlation	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv2	Pearson Correlation	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv3	Pearson Correlation	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv5	Pearson Correlation	.403**
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	53
Motiv6	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv7	Pearson Correlation	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv8	Pearson Correlation	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv9	Pearson Correlation	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Motiv10	Pearson Correlation	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
MotivTot_2	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

Sedangkan pengujian validitas untuk variabel kepatuhan dapat dinyatakan bahwa semua item dalam pertanyaan tersebut adalah valid karena nilainya kurang dari 0,05 ($< 0,05$).

Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan (*Obedience*)

		ObeTot
Obe1	Pearson Correlation	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Obe2	Pearson Correlation	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Obe3	Pearson Correlation	.938**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Obe4	Pearson Correlation	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
Obe5	Pearson Correlation	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	53
ObeTot	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	53

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji derajat kebebasan pengukuran dari kesalahan random dan karenanya menghasilkan bentuk yang konstan, atau dengan kata lain dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan konsisten atau tidak. Teknik pengujian adalah dengan menggunakan alat uji *cronbach's Alpha*.

Dari masing-masing variabel menghasilkan nilai *cronbach's Alpha* diatas 0.7. Berikut tabel-tabelnya.

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepemimpinan (*Leadership*)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.885	10

Tabel 4.16. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan (*Quality*)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.935	9

Tabel 4.17. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Motivasi
(*Motivation*)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.876	9

Tabel 4.18. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan
(*Obedience*)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.932	5

4.3 Uji Confirmatory Factor Analysis

Uji *confirmatory factor analysis*, sebuah pengujian untuk melihat seberapa ideal suatu model regresi dapat terbentuk dengan beberapa variabel yang seharusnya digunakan. Sebelum uji analisis faktor dilakukan, harus diketahui terlebih dulu nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Jika nilai KMO lebih dari 0,5 dan $\text{sig} < 0,05$. Artinya, dapat dilanjut untuk melakukan pengecekan berapa variabel yang dapat terbentuk dalam suatu model. Berikut adalah tabelnya.

Tabel 4.19. Hasil Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	Df
	Sig.
	.558
	2.487E3
	528
	.000

Tabel 4.20. Hasil Uji *Confirmatory Factor Analysis*

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	11.835	35.862	35.862	11.835	35.862	35.862
2	8.636	26.170	62.033	8.636	26.170	62.033
3	2.437	7.386	69.419	2.437	7.386	69.419
4	1.680	5.091	74.510	1.680	5.091	74.510
5	1.172	3.551	78.061	1.172	3.551	78.061
6	.998	3.024	81.085			
7	.940	2.848	83.933			
8	.848	2.570	86.502			
9	.697	2.112	88.614			
10	.587	1.779	90.393			
11	.509	1.543	91.936			
12	.474	1.438	93.373			
13	.384	1.162	94.535			
14	.353	1.069	95.604			
15	.275	.833	96.437			
16	.247	.748	97.186			

17	.163	.493	97.678			
18	.141	.427	98.105			
19	.117	.354	98.460			
20	.104	.316	98.776			
21	.085	.258	99.034			
22	.081	.245	99.279			
23	.059	.178	99.457			
24	.051	.154	99.611			
25	.036	.108	99.719			
26	.023	.070	99.789			
27	.022	.066	99.855			
28	.018	.055	99.911			
29	.011	.033	99.944			
30	.008	.024	99.968			
31	.006	.019	99.987			
32	.003	.010	99.997			
33	.001	.003	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 4.21. Hasil Uji *Confirmatory Factor Analysis* yang Layak Menjadi Variabel dalam Penelitian ini

	Component				
	1	2	3	4	5
Lead1	-.079	.412	.421	.522	-.172
Lead2	.015	.476	.246	.654	.169
Lead3	.861	-.064	-.013	.290	.226
Lead4	.096	.200	.250	.693	.117
Lead5	.305	-.001	-.122	.784	-.006
Lead6	.668	-.042	-.035	.400	.373
Lead7	.602	.098	-.141	.555	-.057
Lead8	.928	.029	-.140	.062	.010
Lead9	.779	-.105	-.028	.321	.028
Lead10	.824	.043	-.077	.264	-.064
Qual1	.725	.075	-.084	-.173	-.088
Qual3	.440	.542	.214	-.225	.428
Qual4	.804	-.011	-.018	-.039	.465
Qual5	.790	.056	.087	.088	.395
Qual6	.929	.031	.111	-.032	.154
Qual7	.676	-.166	.375	.031	.326
Qual8	.787	-.081	.259	.165	-.040
Qual9	.897	-.182	-.056	.088	.104
Qual10	.917	-.040	-.082	-.149	-.143
Motiv1	.334	.423	.596	-.166	-.131
Motiv2	-.195	.249	.861	.079	.125
Motiv3	-.191	.191	.883	-.013	.177
Motiv5	.686	.465	-.016	.089	.189
Motiv6	.000	.277	.688	.180	-.075
Motiv7	-.065	.879	.262	.159	-.099
Motiv8	-.203	.888	.207	.036	.048
Motiv9	-.123	.860	.313	.164	-.010
Motiv10	-.142	.801	.224	.253	.254

Obe1	-.066	.488	.637	.064	.317
Obe2	.277	.425	.352	.185	.530
Obe3	.314	.510	.585	.137	.293
Obe4	.264	.598	.492	-.020	.466
Obe5	.298	.467	.426	.198	.564

Dari 3 tabel di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, jika model telah ideal seharusnya terdiri dari 4 variabel, yaitu 3 variabel independen (kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi) dan 1 variabel dependen (kepatuhan). Namun berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para responden, setelah dilakukan uji *confirmatory factor analysis*, diperoleh suatu model yang dapat dikatakan ideal dengan 5 variabel, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.18.

Meskipun demikian tujuan dari penelitian ini akan tetap fokus kepada variabel-variabel yang akan diujikan. Menurut Tabel 4.19, variabel-variabel yang layak ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kepemimpinan Kepala Desa (*Leadership*), terdiri dari item pertanyaan nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, terdiri dari item pertanyaan nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
3. Variabel Motivasi para Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari item pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 6.
4. Variabel Kepatuhan para Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari item pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau, dapat dikatakan semua item pertanyaan dalam variabel kepatuhan adalah layak untuk digunakan dalam penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas lebih besar daripada alpha (α) maka asumsi normalitas terpenuhi karena Asymp. Sig > 0,05.

Tabel 4.22. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.07929746
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.094
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		.869
Asymp. Sig. (2-tailed)		.437

a. Test distribution is Normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi (*tolerance value*) dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umumnya dipakai adalah *tolerance* lebih kecil daripada 0.10 dan nilai VIF diatas 10. Jika uji multikolinieritas menghasilkan nilai *tolerance* lebih kecil daripada 0.10 dan nilai VIF di atas 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas dan sebaliknya. Tabel berikut ini tidak menunjukkan adanya multikolinieritas dalam model regresi, karena nilai $VIF < 10$.

Tabel 4.23. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LEAD	.757	1.320
QUAL	.780	1.282
MOT	.964	1.037

4.4.3 Hasil Uji Autokorekasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (periode sebelumnya). *Durbin-Watson* (DW test) dapat mendeteksi ada dan tidaknya autokorelasi. Jika nilai DW terletak antara d_U dan $(4-d_U)$ berarti tidak ada autokorelasi. Dari tabel berikut tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW 1,544 > dari batas atas 1,506

Tabel 4.24. Hasil Uji Autokorekasi

Model	Durbin-Watson
1	1.544

4.4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residualnya satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau *varians* antar variabel independen tidak sama. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji *glejser*, yaitu meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen (Gujarati, 1995). Apabila variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen atau apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada α (0.05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.25. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.399	1.415		3.815	.000
LEAD	-.075	.061	-.174	-1.231	.224
QUAL	.014	.030	.067	.478	.635
MOT	-.176	.048	-.459	-3.666	.001

a. Dependent Variable: AbsRes

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat heteroskedastisitas pada variabel motivasi, karena nilai Sig. < 0,05. Terdapatnya heteroskedastisitas dalam model regresi banyak ditemukan pada data *crosssection*. Dalam penelitian ini menggunakan data tersebut. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut dapat dilakukan dengan transformasi logaritma pada setiap variabel, baik independen maupun dependen (Ghozali, 2001). Namun dikarenakan penelitian ini bukan merupakan penelitian ekonometri (tidak melibatkan angka-angka rasio maupun angka nominal yang berdigit banyak, seperti dalam penelitian keuangan) maka hal tersebut tidak peneliti lakukan. Selain penelitian ini merupakan penelitian ilmu sosial yang melibatkan perilaku, juga dikarenakan jawaban yang diberikan atas respon dari kuesioner atas suatu perilaku merupakan jawaban yang bersifat subjektif.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Parsial

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pada level 10% variabel kepemimpinan kepala desa (*leadership*) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*). Ini artinya hipotesis pertama, H_1 terdukung. Namun pada level 5% variabel kepemimpinan kepala desa (*leadership*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*). Ini artinya hipotesis tersebut, H_1 tidak terdukung.

Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (*quality*) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*), yang artinya hipotesis kedua, H_2 terdukung.

Untuk variabel motivasi para wajib pajak bumi dan bangunan (*motivation*) menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*), yang artinya hipotesis ketiga, H_3 terdukung.

Tabel 4.26. Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.684	2.400		1.535	.131
LEAD	.199	.104	.200	1.918	.061
QUAL	.119	.051	.240	2.334	.024
MOT	.543	.082	.617	6.659	.000

a. Dependent Variable: OBE

4.5.2 Hasil Uji Simultan

Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu kepemimpinan kepala desa (*leadership*), kualitas pelayanan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (*quality*), dan motivasi para wajib pajak bumi dan bangunan (*motivation*), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan (*obedience*).

Tabel 4.27. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	330.047	3	110.016	23.978	.000 ^a
Residual	224.821	49	4.588		
Total	554.868	52			

a. Predictors: (Constant), MOT, QUAL, LEAD

b. Dependent Variable: OBE

Jika melihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,57. Ini berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

Tabel 4.28. Hasil Uji Simultan (*Adjusted R Square*)Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.595	.570	2.14200	1.544

a. Predictors: (Constant), MOT, QUAL, LEAD

b. Dependent Variable: OBE

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kepatuhan warga

selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian juga diarahkan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa. Sejauh mana peranan mereka dalam kualitas pelayanan untuk mampu meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi para wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Setelah dilakukan analisis dari hasil pengujian seperti yang disajikan pada halaman sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Candirejo selaku pamong tertinggi di tingkat pemerintahan desa memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan warga desa Candirejo selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.
2. Kualitas pelayanan para perangkat desa atau petugas pemungut pajak yang berada dalam pemerintahan desa mampu memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo.
3. Pemberian motivasi bagi para wajib pajak mampu meningkatkan tingkat kepatuhan warga desa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Hasil penelitian secara simultan tidak dapat menolak hipotesis. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu warga desa Candirejo yang memiliki atau tercatat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan, dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor kepemimpinan kepala desa (*leadership*), kualitas pelayanan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan (*quality*), dan motivasi para wajib pajak bumi dan bangunan (*motivation*).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki beberapa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki terkait dengan instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini pun memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah warga desa Candirejo yang tercatat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga untuk generalisasi hasil penelitian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati.
2. Penelitian ini hanya menguji kepatuhan dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dimana variabel-variabel tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut jika ingin dilakukan penelitian lanjutan.
3. Pemahaman mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini masih sangat luas, sehingga pengertian kepatuhan dan variabel-variabel lainnya dapat menjadi ambigu.

4. Untuk mendapat pemahaman yang lengkap mengenai kegiatan apa yang dilakukan dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh warga desa agar dapat berpartisipasi secara penuh sesuai porsinya dalam peningkatan pendapatan daerah tidak cukup hanya mengetahui variabel kepatuhan dan variabel-variabel dalam penelitian ini. Tetapi juga diperlukan sosialisasi dan penyuluhan yang merata kepada warga desa, agar apa yang menjadi agenda pemerintah desa maupun daerah dapat tercapai melalui pendanaan dari pajak bumi dan bangunan.

5.3 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi para pamong desa selaku pejabat yang duduk di pemerintahan desa untuk dapat memberikan pengaruh positif kepada warga desa untuk patuh dan bersedia memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperbaiki maupun mengembangkan penelitian ini. Saran dan rekomendasi yang dapat peneliti sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Usaha kepala desa dalam mengupayakan kepatuhan warga desa perlu untuk lebih ditingkatkan atau dimaksimalkan. Karena hanya sebagian kecil warga yang mengetahui perihal sosialisasi maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pajak bumi dan bangunan.
2. Penelitian dalam bidang perpajakan maupun perilaku-perilaku yang mempengaruhi wajib pajak dapat terus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Penelitian selanjutnya dapat membuat instrumen yang lebih baik dari yang telah ada saat ini dengan memasukkan variabel-variabel lain yang mampu mendukung hipotesis.
4. Warga desa selaku wajib pajak bumi dan bangunan seyogyanya dapat memiliki perspektif yang lebih baik untuk taat dan tertib dalam membayar pajak, yaitu bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dimaksimalkan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastable, Susan B, 2002. Peran Perawat Sebagai Pendidik. Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Data System Bank Jateng, 2016. Laporan Bulanan PBB-P2 Kecamatan Ngawen per 1 Juni 2016. *Reporting*. Kabupaten Klaten.
- Early, 1987. Task Planning and Energy Expended: Exploration of How Goals Influence Performance. *Jurnal Psikologi*.

- Fachrizal, Muhammad, 2013. Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, (1): 14:26.
- Ghozali, Imam, 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, 1995. Basic Econometrics. McGraw Hill International Editions, New York.
- Kartasapoetra dkk, 1989. Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya. Bina Aksara, Jakarta.
- Kiryanto, 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *Ekobis*, Vol. 1 No. 1, p. 41-52.
- Koentarto, Ilham, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal. Kotawarigin Barat*.
- Kotler, Philip, 2002. Manajemen Pemasaran 1. Millineum ed. PT Prenhallindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Locke, E. A., 1968. Toward a Theory of Task Motivation and Incentive, *Organizational Behavior and Human Performance*.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Jakarta.
- Mitchell, T. R., 1997. Research in Organizational Behavior. CT: JAI Press Greenwich.
- Muljono, Djoko, 2010. Panduan Brevet Pajak-PPN, PPn.BM, Bea Materai, PBB, BPHTB. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Niven, Neil, 2002. Psikologi Kesehatan: Pengantar untuk Perawat & Profesional Kesehatan Lain. EGC, Jakarta.
- Nurkolis, 2003. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Grasindo.
- Purenda, Angga, 2016. Realisasi PBB dari Desa Buruk. *Article*. Situs www.radarsolo.jawapos.com.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A., 2008. Perilaku Organisasi Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Thalib, Gustin, 2013. Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Thoha, Mifta, 2001. Kepemimpinan dalam Manajemen, suatu Pendekatan Perilaku. Grafindo Persada, Jakarta Raja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

Uno, Hamzah B., 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Bumi Aksara, Jakarta.

Winardi, 1997. Kepemimpinan dalam Manajemen. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Zain, Mohammad, 2004. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta.